

PENGARUH PROGRAM INVESTASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

Wan Ridha Khairuna¹, Alya Febrina Harahap², Delvi Dede Amalia³, Putri Wahyuni⁴,
Grace Silvia Manurung⁵

¹Ekonomi / Manajemen, wanridha66@gmail.com, Universitas Negeri Medan

²Ekonomi / Manajemen, alyafebrina02@gmail.com, Universitas Negeri Medan

³Ekonomi / Manajemen, delvidedeamalia3@gmail.com, Universitas Negeri Medan

⁴Ekonomi / Manajemen, putritaming0101@gmail.com, Universitas Negeri Medan

⁵Ekonomi / Manajemen, gracesilviaa@gmail.com, Universitas Negeri Medan

ABSTRACT

Infrastructure development and investment are important for the economy. Infrastructure improves productivity and quality of life, while investment spurs economic growth. The APBN supports both as fiscal policies to manage the economy. Spending on education, health and infrastructure are long-term investments. This research aims to analyze the influence of investment and infrastructure on the APBN in order to design effective and efficient policies, as well as overcome budget management challenges. This research uses quantitative methods with a descriptive approach and regression analysis. Secondary data from state financial reports and the APBN for the 2014-2023 period were analyzed to describe the conditions and trends in APBN expenditure. Normality tests, multicollinearity, heteroscedasticity, and multiple linear regression analysis are used to test the relationship between investment programs, infrastructure development, and APBN expenditure. Data processing using SPSS helps ensure the validity and accuracy of the results. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the investment program makes a positive contribution to APBN expenditure, while infrastructure development does not show a significant influence. This research provides a basis for more effective policy making in allocating APBN funds, with a focus on investment programs that have a positive impact. It is recommended that further research be carried out to evaluate other variables that might influence APBN expenditures and ensure more comprehensive results.

Keywords: Investment, Infrastructure, APBN, Budget

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur dan investasi penting bagi ekonomi. Infrastruktur meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, sementara investasi memacu pertumbuhan ekonomi. APBN mendukung keduanya sebagai kebijakan fiskal untuk mengelola perekonomian. Pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah investasi jangka panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh investasi dan infrastruktur terhadap APBN guna merancang kebijakan yang efektif dan efisien, serta mengatasi tantangan pengelolaan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis regresi. Data sekunder dari laporan keuangan negara dan APBN periode 2014-2023 dianalisis untuk menggambarkan kondisi dan tren pengeluaran APBN. Uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hubungan antara program investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengeluaran APBN. Pengolahan data menggunakan SPSS membantu memastikan validitas dan akurasi hasil. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa program investasi memberikan kontribusi positif terhadap pengeluaran APBN, sementara pembangunan infrastruktur tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam pengalokasian dana APBN, dengan fokus pada program investasi yang memberikan dampak positif. Disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi variabel lain yang mungkin mempengaruhi pengeluaran APBN dan memastikan hasil yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Investasi, Infrastruktur, APBN, Anggaran

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur dan investasi merupakan dua aspek penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Infrastruktur, yang mencakup transportasi, komunikasi, energi, dan fasilitas publik lainnya, memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu,

investasi, baik dalam sektor swasta maupun pemerintah, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alokasi dana yang diatur oleh pemerintah untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur dan program investasi. Pengeluaran APBN untuk program ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat investasi pemerintahan terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran sendiri merupakan alat investasi pemerintahan terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi (Safira et al., 2019)

Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. APBN pada perkembangannya telah mengalami banyak perubahan struktur. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek pembangunan pada ketiga bidang tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat time lag ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja Negara untuk ketiga bidang tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtut waktu (time series) cukup panjang. (Suparno, 2014)

Infrastruktur tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu Negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa subbidang, beberapa di antaranya yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur ke seluruh bagian wilayahnya. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Ramelan dalam Djohan, 2019)

Menurut (Friawan, 2008) ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Alasan pertama adalah ketersediaan infrastruktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Alasan ketiga adalah perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara. Infrastruktur terdiri dari beberapa sub bidang, infrastruktur dalam bentuk perumahan dan transportasi merupakan cukup penting.

Pengeluaran Negara	Realisasi Pengeluaran Negara (Keuangan) (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
PENGELUARAN NEGARA	3.096.262,7	3.123.677,3	3.325.118,9
I. Pengeluaran Pemerintah Pusat	2.280.027,9	2.298.242,4	2.467.527,2
1. Belanja Kementerian dan Lembaga	1.084.674,7	1.085.485,6	1.090.831,2
2. Belanja Non-Kementerian dan Lembaga	1.195.353,2	1.212.756,8	1.376.696
II. Pengeluaran untuk Daerah	816.234,8	825.434,9	857.591,7
1. Transfer ke Daerah	748.328,7	755.504,9	786.591,7
a. Dana Perimbangan	719.578,8	729.003,6	758.900,2
b. Dana Insentif Daerah	6.993,7	7.840	8.000
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	21.756,3	18.661,3	19.691,5
2. Dana Desa	67.906,1	69.930	71.000
III. Suspend	-	-	-

Data pengeluaran negara di atas menunjukkan realisasi pengeluaran negara (keuangan) di Indonesia untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Pengeluaran negara terdiri dari pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran untuk daerah.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Pengeluaran Pemerintah Pusat 2022 sebesar 2.280.027,9 Miliar Rupiah, 2023 sebesar 2.298.242,4 Miliar Rupiah, dan 2024 sebesar 2.467.527,2 Miliar Rupiah. Pengeluaran untuk Daerah pada tahun 2022 sebesar 816.234,8 Miliar Rupiah, 2023 sebesar 825.434,9 Miliar Rupiah, dan 2024 sebesar 857.591,7 Miliar Rupiah. Pengeluaran pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian dan lembaga, serta belanja non-kementerian dan lembaga. Pertama belanja Kementerian dan Lembaga di tahun 2022 sebesar 1.084.674,7 Miliar Rupiah, 2023 sebesar 1.085.485,6 Miliar Rupiah, dan 2024 sebesar 1.090.831,2 Miliar Rupiah. Kedua belanja Non-Kementerian dan Lembaga pada tahun 2022 sebesar 1.195.353,2 Miliar Rupiah, 2023 sebesar 1.212.756,8 Miliar Rupiah, dan 2024 sebesar 1.376.696 Miliar Rupiah. Pengeluaran untuk daerah terdiri dari transfer ke daerah dan dana desa. Pertama ada transfer ke daerah pada tahun 2022 sebesar 748.328,7 Miliar Rupiah, 2023 sebesar 755.504,9 Miliar Rupiah, dan 2024 sebesar 786.591,7 Miliar Rupiah. Transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY. Dana Perimbangan tahun 2022 sebesar 719.578,8 Miliar Rupiah, 2023 sebesar 729.003,6 Miliar Rupiah, dan 2024 sebesar 758.900,2 Miliar Rupiah. Dana Insentif Daerah tahun 2022 sebesar 6.993,7 Miliar Rupiah, 2023 sebesar 7.840 Miliar Rupiah, dan tahun 2024 sebesar 8.000 Miliar Rupiah. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY di tahun 2022 sebesar 21.756,3 Miliar Rupiah, 2023 sebesar 18.661,3 Miliar Rupiah, dan 2024 sebesar 19.691,5 Miliar Rupiah

Namun, pengeluaran APBN untuk program ini juga menimbulkan beberapa tantangan. Pertama, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan. Kedua, ada risiko bahwa pengeluaran yang tidak terkontrol dapat menyebabkan defisit anggaran atau meningkatkan beban utang negara. Ketiga, ada tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh program investasi dan pembangunan infrastruktur terhadap pengeluaran APBN menjadi penting. Penelitian ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan APBN, serta dalam mengevaluasi dampak dari program ini terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini mengemukakan pertanyaan yaitu pertama, bagaimana pengaruh program investasi terhadap pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). Kedua, bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh program investasi dan pembangunan infrastruktur terhadap pengeluaran APBN.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Program Investasi

Investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional yang sifatnya jangka panjang; peran investasi diharapkan mampu mengatasi persoalan ketimpangan wilayah, melalui keterlibatan dalam proses realisasi Proyek Prioritas Strategis/Major Projects (Perpres No. 18/2020), Proyek Strategis Nasional/PSN (Perpres No. 3/2016 jo. No. 109/2020), dan proyek prioritas lainnya mengacu a.l.: Sislognas (Perpres No. 26/2012), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (PP 50/2011), percepatan pembangunan ekonomi Jatim (Perpres No. 80/2019), dan Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Perpres No. 55/2019), yang tersebar di 34 provinsi; perlu adanya informasi yang komprehensif guna membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di Indonesia; dan perlunya dukungan terhadap peningkatan dan percepatan tumbuhnya investasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 (Khoirul Anwar et al., 2023).

Menurut (Hartono, 2014) investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai

akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Menurut (Sumanto, 2006) investasi merupakan komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan. Sedangkan Husnan dalam (Anoraga, 2006) mendefinisikan investasi sebagai penggunaan uang dengan maksud memperoleh penghasilan. Investasi merupakan penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu maupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka (Mankiw, 2000).

2.2. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur adalah pendorong utama perekonomian. Sarana transportasi mampu memfasilitasi orang, barang, serta jasa yang dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya bahkan ke luar negeri sekalipun. Infrastruktur berperan penting guna memudahkan proses produksi, maupun meningkatkan distribusi komoditas ekonomi. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Ikhsan dalam (Wahyuni, 2009) yang menyatakan bahwa dari sisi langsung pembangunan infrastruktur itu sendiri adalah aktivitas produksi untuk menciptakan, menghasilkan kesempatan untuk kerja. Secara tidak langsung, dengan adanya infrastruktur yang dapat mempengaruhi perkembangan bidang-bidang ekonomi lainnya, terutama pada infrastruktur dasar yang menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada infrastruktur lainnya. Yang pada akhirnya perbaikan infrastruktur dapat mampu meningkatkan keadaan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan (Hidayat & Azhar, 2022)

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan di dalam proses pertumbuhan ekonomi karena dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan perkapita. Infrastruktur berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian (Prasetyo & Firdaus, 2009). Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah (Andy et al., 2019).

Infrastruktur yang tidak memadai mengurangi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur diakui secara luas sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mendorong pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia dinilai rendah dibandingkan negara lain karena dalam hal kualitas infrastruktur dan pembangunan infrastruktur tidak memadai dan menjadi hambatan bagi beberapa perusahaan untuk beroperasi dan berinvestasi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritasnya (Putri et al., 2024).

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut (Bastian, 2010) APBN merupakan bentuk pengendalian keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan undang-undang setiap tahunnya. APBN yang dibentuk harus memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara dan kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan.

Anggaran suatu negara merupakan sebuah proses kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif, sehingga sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Di Indonesia, pengelolaan anggaran publik dikenal dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) yang berisi daftar rencana penerimaan dan belanja negara secara terperinci dalam satu tahun anggaran. Anggaran publik ini mempunyai peran penting sebagai alat legitimasi pemerintah dalam mengelola keuangan negara demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur (*Direktorat Jenderal Anggaran*, 2016).

Sebelum tahun 1999, prinsip APBN adalah anggaran yang dinamis dan berimbang, dimana tingkat penerimaan negara selalu sesuai dengan pengeluaran pemerintah, dengan upaya peningkatan jumlahnya

dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1999 hingga saat ini, prinsip dasar anggaran adalah anggaran surplus/defisit. Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN berubah dari T-rekening menjadi I-rekening. Perbedaan antara prinsip surplus/defisit fiskal dan prinsip anggaran berimbang adalah 1) pinjaman luar negeri dicatat sebagai sumber dana dan bukan sebagai sumber pendapatan, dan 2) defisit fiskal dibiayai setelah dikurangi sumber dalam negeri. Sumber pendanaan eksternal. Bila pengeluaran lebih kecil dari anggaran, maka disebut surplus anggaran. Namun jika anggaran lebih kecil dari pengeluaran atau pengeluaran lebih besar dari anggaran maka disebut anggaran defisit. Setiap kebijakan anggaran mempunyai trennya masing-masing. Misalnya, sistem anggaran berimbang cenderung menghasilkan perekonomian yang lebih stabil dibandingkan kebijakan anggaran defisit dan surplus.

APBN terdiri atas pendapatan dan subsidi pemerintah, belanja negara, dan pinjaman yang merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk merangsang perekonomian nasional, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan penyerapan yang semakin kuat mendorong pertumbuhan, begitu pula sebaliknya. Kebijakan APBN diharapkan responsif terhadap kecenderungan masyarakat, baik dalam konteks pembangunan ekonomi secara umum maupun perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri, oleh karena itu diperlukan kebijakan fiskal yang fleksibel.

Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara: subsidi, pengeluaran pemerintah, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan keuangan publik. Sejak tahun anggaran 2000, Indonesia telah mengubah struktur APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS), standar statistik keuangan pemerintah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis regresi. Penelitian kuantitatif menurut (Djaali, 2021) adalah penelitian yang bersifat inferensial dalam arti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistika, dengan menggunakan data empirik hasil pengumpulan data melalui pengukuran. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti laporan keuangan negara, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta laporan tahunan terkait program investasi dan pembangunan infrastruktur. Data sekunder menurut (Dr. Asep Hermawan, 2005) merupakan struktur data historis mengenai variabel variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Data yang dikumpulkan mencakup periode sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2023 untuk memastikan hasil analisis yang komprehensif dan relevan.

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan tren pengeluaran APBN serta program investasi dan pembangunan infrastruktur selama periode penelitian. Ada beberapa uji data yang digunakan seperti uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal, uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan apakah dalam suatu data model regresi terdapat interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Sehingga, jika terjadi multikolinearitas maka variabel bebas akan berkorelasi kuat dan kekuatan prediksinya akan tidak stabil, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Pengujian ini merupakan faktor yang menyebabkan model regresi linear tidak efisien dan akurat. Dalam pengujian ini, jenis uji yang digunakan adalah uji Glejser dan yang terakhir adalah analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen (program investasi dan pembangunan infrastruktur) dan variabel dependen (pengeluaran APBN). Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan memahami sejauh mana program investasi dan pembangunan infrastruktur mempengaruhi pengeluaran APBN.

Untuk validasi model dan pengujian hipotesis, uji statistik seperti uji t dan uji F diterapkan. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS, yang memungkinkan analisis data secara akurat dan efisien. Interpretasi hasil analisis bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai pengaruh program investasi dan pembangunan infrastruktur terhadap pengeluaran APBN, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan berdasarkan temuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tabel Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	116993,4281
Most Extreme Differences	Absolute	,181
	Positive	,181
	Negative	-,180
Kolmogorov-Smirnov Z		,573
Asymp. Sig. (2-tailed)		,898

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,898 > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

4.2 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	802764,099	176804,192		4,540	,003		
	Program Investasi	2,973	,409	1,040	7,275	,000	,587	1,702
	Pembangunan Infrastruktur	-649,515	674,307	-,138	-,963	,368	,587	1,702

a. Dependent Variable: APBN

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan apakah dalam suatu data model regresi terdapat interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Sehingga, jika terjadi multikolinearitas maka variabel bebas akan berkorelasi kuat dan kekuatan prediksinya akan tidak stabil. Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai tolerance yang didapat $0,587 > 0,100$ dan nilai VIF $1,702 < 10,00$. Maka dapat dikatakan bahwa Program investasi dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pengeluaran APBN tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.3 Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	135799,447	84844,662		1,601	,154
	Program Investasi	,372	,196	,756	1,898	,099
	Pembangunan Infrastruktur	-486,574	323,586	-,599	-1,504	,176

a. Dependent Variable: Abs_Res

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Pengujian ini merupakan faktor yang menyebabkan model regresi linear tidak efisien dan akurat. Dalam pengujian ini, jenis uji yang digunakan adalah uji Glejser. Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk Program Investasi $0,099 > 0,05$ dan Pembangunan Infrastruktur $0,176 > 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa Program Investasi dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pengeluaran APBN tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.4 Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	802764,099	176804,192		4,540	,003
Program Investasi	2,973	,409	1,040	7,275	,000
Pembangunan Infrastruktur	-649,515	674,307	-,138	-,963	,368

a. Dependent Variable: APBN

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2$$

$$Y = 802.764,099 + 2,973X_1 + (-649,515X_2)$$

- Nilai konstanta (B₀) positif menunjukkan pengaruh positif variabel bebas (X₁ dan X₂)
- 2,973(X₁) adalah nilai koefisien regresi variabel X₁ terhadap Y artinya jika variabel X₁ mengalami kenaikan satu satuan maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 2,974 atau 297,4%
- -649,515(X₂) adalah nilai koefisien regresi variabel X₂ terhadap Y artinya jika variabel X₂ mengalami kenaikan satu satuan maka Y akan mengalami penurunan sebesar 649,515 atau 64.951,5%

Kesimpulan untuk pengaruh parsial (Uji t)

- Program Investasi, Nilai t hitung = 7,275 > t tabel = 2,30600 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti ada pengaruh positif secara parsial antara Program Investasi terhadap Pengeluaran APBN
- Pembangunan Infrastruktur, Nilai t hitung = -0,963 < t tabel = 2,30600 dan nilai signifikansi 0,368 > 0,05, yang berarti ada pengaruh negatif secara parsial antara Pembangunan Infrastruktur terhadap Pengeluaran APBN

Kesimpulan untuk pengaruh Simultan (Uji f)

Nilai F hitung = 38,169 > F tabel = 4,74 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti ada pengaruh secara simultan antara Program Investasi dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pengeluaran APBN

Nilai R Square (R²) adalah 0,916. Hasil tersebut memberikan arti bahwa Program Investasi dan Pembangunan Infrastruktur secara simultan terhadap Pengeluaran APBN adalah sebesar 91,6%

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa program investasi memberikan kontribusi positif terhadap pengeluaran APBN, sementara pembangunan infrastruktur tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam pengalokasian dana APBN, dengan fokus pada program investasi yang memberikan dampak positif. Disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi variabel lain yang mungkin mempengaruhi pengeluaran APBN dan memastikan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andy, H., Panjaitan, M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.2944/jekp.8.1.43-61>
- [2] Anoraga, P. P. (2006). *Pengantar pasar modal*.
- [3] Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (Edisi Ketiga). Erlangga.
- [4] *Direktorat Jenderal Anggaran*. (2016).
- [5] Djaali. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). Bumi Aksara.
- [6] Dr. Asep Hermawan, M. S. (2005). *Penelitian Bisnis - Paradigma Kuantitatif*. Grasindo.
- [7] Friawan, D. (2008). Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *CSIS*, 37(2).
- [8] Hartono, J. (2014). *Teori dan Praktik Portofolio dengan Excel*. Salemba Empat.

- [9] Hidayat, A. Y., & Azhar, Z. (2022). Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 65–74.
- [10] Khoirul Anwar, M., Yunanto, S., Gandini Purbaningrum, D., Rizkynata, R., Administrasi Publik, J., & Muhammadiyah Jakarta, U. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM PENYUSUNAN PETA PELUANG INVESTASI DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN REALISASI INVESTASI DI INDONESIA (STUDI DI KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA). *Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 201–208. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.601>
- [11] Mankiw, N. , G. (2000). The Savers-Spenders Theory of Fiscal Policy. *American Economic Review*, 90(2), 120–125.
- [12] Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). PENGARUH INFRASTRUKTUR PADA PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH DI INDONESIA. *Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222–236.
- [13] Putri, C. A., Noviantini, E. F., Ramadhani, N., & Fadilla, A. (2024). Peran APBN dalam Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah di Indonesia. In *Journal of Regional Economics and Development* (Vol. 1, Issue 3). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jred>
- [14] Safira, Djohan, S., & Nurjanna. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi kalimantan timur. *FORUM EKONOMI*, 21(2), 211–216. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- [15] Sumanto, E. (2006). Analisis pengaruh perkembangan pasar modal terhadap perekonomian Indonesia. *Economics and Development Studies*.
- [16] Suparno, H. (2014). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *Ekonomika-Bisnis*, 5(1), 1–22.
- [17] Wahyuni, K. T. (2009). Analisis pengaruh infrastruktur ekonomi dan sosial terhadap produktivitas ekonomi di Indonesia.